



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGANI BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

(Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SYALAISHA AMANI FATI'AH

NIM. 12120420818

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGANI BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS DI DESA PEKAN HERAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU"** yang ditulis oleh:

Nama : Syalaisha Amani Fati'ah

NIM : 12120420818

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Nur, M.A.
NIP. 197209222005011004

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag.
NIP. 196507041994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Syalaisha Amani Fati'ah
NIM : 12120420818
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK

Sekretaris
Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH
NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Syalaisha Amani Fati'ah
 Nim : 12120420818
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
 Waktu : 07.30-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Ahmad Mas'ari, SHI., MA, HK

Sekretaris
Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Syalaisha Amani Fati'ah
NIM : 12120420818
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul : **Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu)**

beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis (*Author*) dan Pembimbing sebagai *co Author* atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Syalaisha Amani Fati'ah
Nim. 12120420818

*) coret yang tidak perlu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syalaisha Amani Fati'ah, (2025): Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu)

Latar belakang pada penelitian ini ingin melihat peranan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani bencana banjir yang terjadi di Desa Pekan Heran. Banjir ini merupakan masalah nyata bagi Masyarakat Desa Pekan Heran baik itu dari segi material dan non material dari sebab itu peranan BPBD ini mempunyai Peran sangat penting dalam menanggulangi bencana banjir.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir dan bagaimana peran lembaga tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini Penulis menerapkan jenis riset lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis meliputi yakni dengan menggali data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPBD Kabupaten Indragiri Hulu belum menjalankan perannya secara maksimal kurangnya kesiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, keterbatasan logistik dan tenaga medis, serta minimnya penyuluhan dan pelatihan kepada Masyarakat terkait mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendukung juga belum berjalan optimal serta Peralatan penanggulangan bencana masih kurang dari standarisasi peralatan yang semestinya. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah khususnya pada konsep *siyasah tanfidziyah*, peran BPBD sebagai bagian dari *eksekutif* merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan *normatif* dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Peran, BPBD, Pelaksanaan, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan KaruniaNya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGANI BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS DI DESA PEKAN HERAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pintu surga, yaitu Ibunda Desmawati, Cinta pertama, Ayah Afrizal, kalian merupakan motivator terbesar. Terimakasih karena melahirkan, merawat, membimbing, membesarkan, menjadi pendengar yang baik, mendo'akan, selalu memenuhi semua keinginan dan kebutuhan Lala, selalu mendukung keputusan hidup Lala, memberikan pendidikan yang baik, tidak pernah menuntut apapun terhadap Lala, mengapresiasi hal-hal kecil hingga besar yang bisa Lala capai. Ayah Umi, adalah salah satu alasan mengapa Lala kuliah setinggi mungkin, *so* gelar S.H ini spesial untuk kalian. Terimakasih karena selalu melangitkan do'a kalian sehingga Lala selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun. Adik-Adik tersayang, Ibrahim Afdessya, Muhammad Zaydan Afdessya, Terimakasih karena telah menjadi alasan untuk Kakak tetap kuat dan melangkah sejauh ini. dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan Uin Suska Riau gemilang dan terbilang.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E, M. Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahri, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag dan Bapak Drs. H Zainal Arifin , M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Mulyadi, S.Sos selaku Ketua Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang telah memberikan izin untuk penelitian kepada penulis.
9. Bapak Amrianto, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, Bapak Rizki Yunzira, S.Kom selaku Staf bagian Program dan Perencanaan, Bapak Adi Candra selaku Danton Satgas Penanggulangan Bencana, Ibu Desvita selaku Kasi Pengolahan Data dan Informasi, Ibu Rina Agus Triyeni selaku Petugas Pelayanan Informasi Penerima Permohonan yang telah memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada sahabat kecil sekaligus kakak, Daffa Hartia Nabilla yang memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa, selalu menjadi pendengar yang baik, sabar, dukungan yang tiada henti dan bantuan dalam segala jal selama menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Terimakasih kepada sahabat dekat, Eka Helvirianti yang selalu menjadi garda terdepan, selalu mengingatkan jaga kesehatan serta selalu setia mendengarkan keluhan kesah peneliti dalam pengerjaan skripsi.
12. Terimakasih kepada seseorang yang tersayang, Miko Jr yang telah menemani dan membersamai Penulis selama penyusunan Skripsi dalam kondisi apapun, telah menjadi *support sistem* dan mendengarkan keluhan kesah Penulis, telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi Penulis hingga Penulis penyusunan Skripsi selesai.
13. Terimakasih teman seperjuangan penulis rekan-rekan angkatan 21 khususnya kelas A, Teman-teman perjuangan Raudhatul Jannah, Nurul Hikmayani, Agus Cyntia Putri, Rara Wirdatul Livia, Nur Al Finta, dan Hesty Sulistyo Ningtyas yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu suka maupun duka.
14. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiinn yaa robbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Penulis

SYALAISHA AMANI FATI'AH

12120420818



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

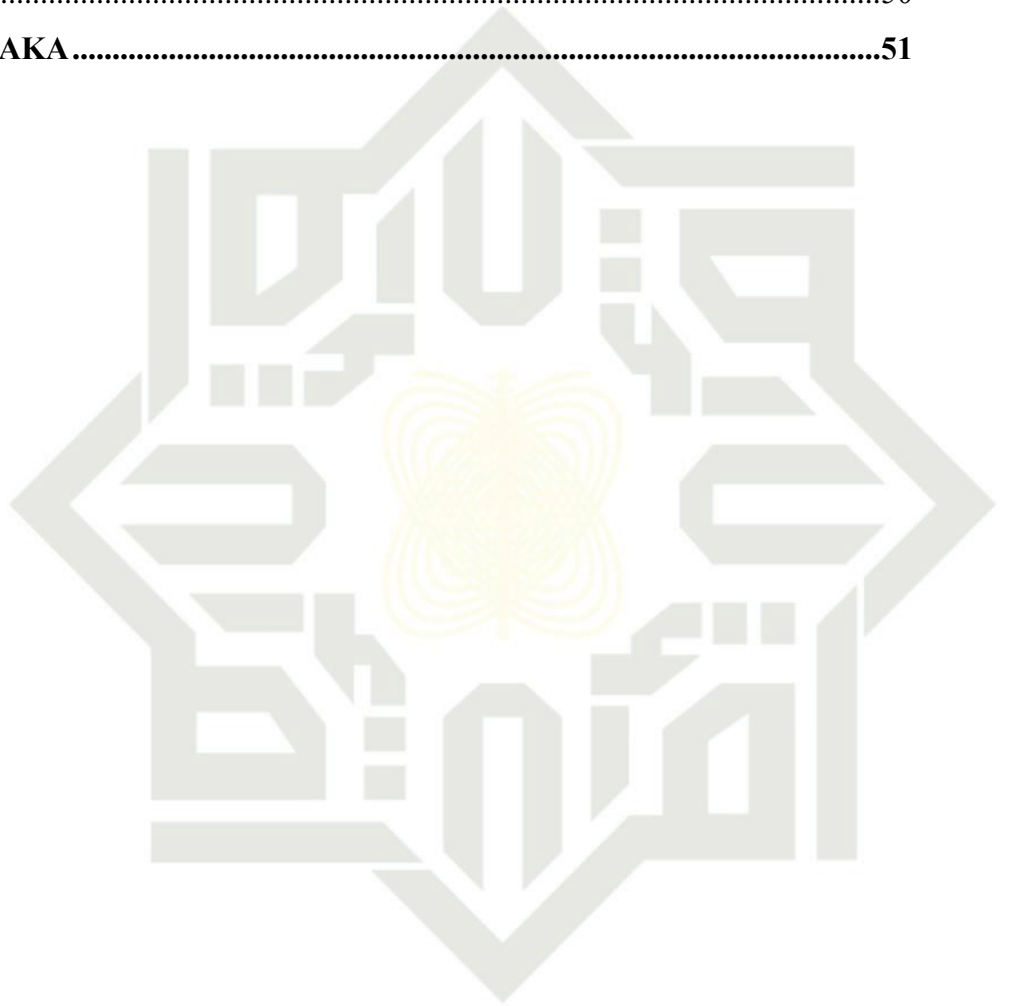
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Peran	9
2. Jenis-jenis peran	9
B. Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah	11
1. Pengertian Bencana Dalam Fiqh Siyasah	12
2. Bentuk-Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah	13
3. Jenis-Jenis Bencana	14
4. Penyebab Terjadinya Bencana	15
C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	18
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Informan	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pekan Heran	32
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	36
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis, dilihat dari letaknya berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau We di Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di 6° LU. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada pada 11° LS. Wilayah Indonesia paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95° BT dan wilayah Indonesia paling timur di Kota Merauke yang berada pada 141° BT.¹ Musim hujan di Indonesia terjadi ketika angin lembab yang berasal dari arah daratan Asia menuju ke arah Benua Australia, periode ini di sebut sebagai periode angin barat yang bertepatan dengan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.¹ Hujan yang terjadi di Indonesia bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, salah satu dampak negatif yang dapat timbul adalah munculnya bencana banjir di Indonesia.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.² Bencana banjir yang timbul akan menimbulkan berbagai macam kerugian, berdasarkan data yang sudah di himpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Perkiraan kerugian tersebut

¹ <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-letak-astronomis-indonesia-dan-pengaruhnya>, diakses pada tanggal 12 oktober 2024, pukul 20.20

² <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>, diakses pada tanggal 12 oktober 2024, pukul 20.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum memperhitungkan bencana banjir dalam skala kecil, kerugian immaterial dan kerugian tidak langsung yang tidak sedikit jumlahnya.³ Banjir sendiri dapat terjadi karena ulah tangan manusia yang tidak mencintai alam sekitarnya, terutama keadaan sungai yang tidak di jaga, membuang sampah sembarangan ke sungai, melakukan penambangan pasir di sungai adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh warga desa Pekan Heran terhadap rusaknya sungai yang dapat menyebabkan banjir. banjir yang terjadi juga menenggelamkan lahan pertanian dan memutus jalan transportasi. Banjir juga merendam rumah warga yang berdampak pada kerugian materil, selain itu kerugian yang dirasakan oleh petani di kawasan banjir adalah kerugian ekonomi karena tenggelamnya tanaman padi yang di areal sawah sehingga mengakibatkan rusaknya tanaman padi.

Pemerintah dalam penanggulangan terjadinya bencana dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional, untuk di tingkat daerah yaitu di Kabupaten atau Kota di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hulu memiliki peran penting dalam penanganan bencana, termasuk banjir di Desa Pekan Heran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

³ Arief Rosyidie, Banjir: Fakta dan Dampaknya Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan, (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 3, Desember 2013), hlm.241 - 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bencana, BPBD ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai fungsi mencegah dan menanggulangi bencana daerah.⁴

Dalam perspektif fiqh siyasah, penanganan bencana dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat. Fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan publik. BPBD sebagai lembaga pemerintah, harus menjalankan fungsi ini dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya undang-undang tersebut, BPBD diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam rangka menciptakan sistem penanganan bencana yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang mengharuskan penguasa untuk mendengarkan dan melibatkan suara rakyat dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, peran BPBD dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penanganan fisik bencana, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam fiqh siyasah.

Dalam menangani bencana banjir di Indragiri Hulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan

⁴ Skripsi Ratna Dila, "Kinerja BPBD Dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 DI Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqh Siyasah". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fungsi administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fiqh siyasah yang mengedepankan keadilan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan. Melalui implementasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana, sambil memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan prinsip-prinsip syariah

1. Dasar Hukum dan Kebijakan

Dasar hukum BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya. Kebijakan BPBD terkait penanggulangan bencana diatur dalam konteks Fiqih Siyasah, yang merupakan kajian hukum Islam tentang pemerintahan⁵

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang ini mengatur tentang penanggulangan bencana, termasuk banjir, yang sering terjadi di daerah tersebut. Dalam konteks fiqh siyasah, kebijakan publik dalam penanganan bencana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap Masyarakat.

2. Pentingnya Perlindungan Masyarakat

Dalam fiqh siyasah, salah satu tujuan utama dari pemerintahan adalah melindungi warganya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan penting dalam melakukan mitigasi, respon, dan rehabilitasi setelah bencana. Melalui program-program yang diatur dalam Undang-undang, Badan

⁵https://www.google.com/search?q=dasar+hukum+dan+kebijakan+bpbd+fiqh+siyasah&sca_esv

diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.25

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, terutama di Desa Pekan Heran yang sering terdampak banjir.

3. Mitigasi dan Edukasi

Undang-undang tersebut mendorong BPBD untuk melakukan kegiatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah, tindakan ini sejalan dengan prinsip pencegahan (dar'al-mafasid) yang menekankan pentingnya menghindari kerugian sebelum terjadi bencana. Edukasi tentang kesiapsiagaan bencana menjadi krusial agar masyarakat dapat mengurangi risiko dan memahami tindakan yang perlu diambil saat banjir terjadi.

4. Partisipasi Masyarakat

Dalam fiqh siyasah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah hal yang penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana. Melalui musyawarah dan dialog, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan solusi yang relevan dengan kondisi lokal, sehingga penanganan bencana menjadi lebih efektif.

5. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan

Setelah bencana penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan yang telah diambil. Fiqh siyasah mendorong adanya pembaruan dan perbaikan berkelanjutan (tashil al-siyasah) berdasarkan pengalaman dan feedback dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu relevan dan efektif dalam menghadapi bencana di masa depan.

6. Kesiapan Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun materi, siap digunakan dalam penanganan bencana. Dalam fiqh siyasah, pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkeadilan adalah kunci untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam proses ini.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian pada tahun 2024 tentang bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana studi kasus di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu, dan Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana studi kasus di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana studi kasus di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana studi kasus di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mencegah bencana banjir
2. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan topik penelitian, yaitu tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Pekan Heran

3. Penelitian ini memberikan peneliti pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir di daerah tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peranan. dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, menurut Soerjono Soekanto, bahwasanya peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu jabatan dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut.⁶ peran sangat mempengaruhi karakter/kepribadian seseorang ketika menduduki jabatan, menyebabkan seseorang dapat melakukan kebijakan atau kepentingan untuk diri sendiri atau kelompoknya.

2. Jenis-jenis peran

Jenis-jenis Peran Menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi tiga (3) jenis, di antaranya yaitu:

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peranan Normatif Peranan normatif adalah jenis peran yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peranan Ideal Peranan ideal adalah jenis peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem
- c. Peranan Faktual Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan Pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

Adapun indikator-indikator peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, bahwa peran adalah suatu kecakapan bertindak yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni untuk dilakukan.
- b. Peran sebagai strategi, peran ini berdalih bahwa peran adalah cara memperoleh dorongan atas dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran dipergunakan sebagai proses untuk mempermudah berkomunikasi terkait dengan informasi atau pengumuman dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dilandaskan bahwa pemerintah merancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan persepsi dari masyarakat adalah masukan yang bernilai guna untuk mewujudkan kebijakan yang reaksi cepat dan tanggap.

⁷ Ibid. h.243

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran ini digunakan sebagai proses untuk menanggulangi atau menekan masalah melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ahli. Anggapan dengan melakukan persepsi ini bisa menekan rasa ketidakpercayaan dan kekacauan.⁸

B. Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah

BPBD bertugas menyelamatkan dan melindungi nyawa manusia dari dampak bencana. Ini sangat sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Penanggulangan bencana oleh BPBD adalah kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tapi ditetapkan demi kemaslahatan rakyat. Maka kebijakan ini sah menurut prinsip masalah mursalah, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam fiqh siyasah, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan rakyat. BPBD mewakili pelaksanaan kewenangan itu secara terdesentralisasi, sesuai dengan prinsip tafwidh (delegasi kekuasaan). BPBD merupakan bagian dari struktur administratif negara, dan pelaksanaan tugas-tugasnya adalah bentuk dari siyasah idariyyah (politik administratif), yakni pengelolaan birokrasi negara untuk mencapai kemaslahatan publik. Prinsip keadilan ('adl) dan amanah (tanggung jawab) dalam Islam menuntut agar aparat negara, termasuk BPBD, bertugas secara profesional, tidak diskriminatif, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

⁸ Horoeopetri dkk, *peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, (Jakarta:Walhi, 2003), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Bencana Dalam Fiqh Siyasah

Dalam konteks Fiqh Siyasah, Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan Masyarakat Fiqh Siyasah, sebagai bagian dari ilmu hukum islam, yang membahas bagaimana islam mengatur dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan, termasuk bencana.

Fiqh Siyasah dalam konteks bencana mencakup prinsip-prinsip islam dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat maupun setelah terjadinya bencana. Ini termasuk bagaimana Pemerintah dan Masyarakat seharusnya bertindak, bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam situasi darurat

Bencana dalam perspektif Islam adalah segala bentuk peristiwa yang menimpa individu atau masyarakat yang membawa kesulitan, penderitaan, atau kerugian, yang terjadi atas kehendak Allah SWT sebagai ujian, peringatan, atau bentuk kasih sayang-Nya. Bencana bukan semata-mata sebagai azab, tetapi bisa juga sebagai sarana introspeksi diri, peningkatan iman, dan penghapusan dosa. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taghabun: 11:

"مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ."

Artinya adalah: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Fiqh Siyasah, penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintahan islam untuk melindungi masyarakat dari berbagai bahaya dan kerusakan. Ini berkaitan dengan prinsip masalah ammah (kemaslahatan umum) dan menjaga maqashid syariah, terutama jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan.

Dalam sistem Islam, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab khalifah, amir, atau wali al-amr (pemimpin pemerintahan). Pemimpin ini memiliki wewenang penuh untuk menjaga rakyat dan dapat membentuk struktur atau lembaga khusus sebagai wakilnya untuk menangani bencana. Dalam praktik sejarah, tanggung jawab ini dijalankan langsung oleh kepala negara atau pejabat yang ditugaskan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam islam maupun hukum positif Indonesia, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam Islam, hal ini merupakan bagian dari tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keselamatan umat. Sementara dalam hukum positif, tanggung jawab tersebut dilembagakan secara sistematis melalui BNPB dan BPBD yang berfungsi melakukan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara profesional dan berkesinambungan.

2. Bentuk-Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah

Dalam Fiqh Siyasah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam menjaga kemaslahatan umum dan melindungi Masyarakat dari bencana. Adapun bentuk-bentuk badan penanggulangan bencana dalam fiqh siyasah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wilāyatul hisbah (fungsi pengawasan dan pencegahan)

Hisbah adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan moral dan sosial dalam masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks penanggulangan bencana, hisbah berfungsi sebagai pengawas terhadap pelanggaran lingkungan dan pembangunan yang menimbulkan risiko bencana, serta menyuarakan peringatan dini terhadap potensi kerusakan.

b. Wilāyatul ammah (fungsi pelayanan umum dan kesejahteraan)

Wilāyah ammah adalah otoritas pemerintah dalam memberikan layanan publik, termasuk perlindungan dan pemulihan korban bencana, penyediaan sarana darurat, serta pemulihan sosial dan ekonomi pasca bencana. Ini mencerminkan pran pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat.

c. Lembaga darurat (wilayah krisis / situasi gawat darurat)

Lembaga ini bersifat fleksibel, responsif, dan beroperasi pada kondisi luar biasa yang memerlukan kebijakan cepat. Dalam fiqh siyasah, darurat memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan istimewa demi menyelamatkan jiwa dan kepentingan umum, bahkan jika hal itu menyimpang dari prosedur normal.

3. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-Jenis Bencana Peristiwa bencana dapat diklasifikasikan menjadi:⁹

Bencana Alam Di antara bentuk-bentuknya antara lain:

⁹ Himpunan Putusan Tarjih 3, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018),h 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gempa Bumi yaitu getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
- b. Letusan gunung api Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- c. Tsunami Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (“*tsu*” berarti lautan “*nami*” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- d. Tanah longsor yaitu salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng
- e. Banjir Yaitu peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang datang tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada aliran sungai pada alur sungai.

4. Penyebab Terjadinya Bencana

Banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia, Curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir, selain itu faktor ulah manusia juga berperan penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah kedalam sungai, serta Pembangunan pemukiman di daerah dataran rendah.¹⁰

Berupa faktor-faktor penyebab banjir digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Alam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan. Faktor yang mempengaruhi peristiwa bencana alam yakni hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Contoh Curah hujan dan jenis tanah, Banjir di perkotaan semakin di terparah oleh adanya hujan lebat dan peristiwa iklim yang ekstrem disamping akibat adanya perubahan dramatis terhadap guna lahan. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan volume air yang masuk ke dalam sistem drainase, misal sungai, melebihi kapasitas rencana. Bila mana volume air yang masuk melebihi tebing sungai, maka akan menimbulkan banjir atau genangan termasuk bobolnya tanggul Sungai. Jenis tanah tertentu juga memiliki perbedaan respon terhadap curah hujan. Tanah dengan tekstur halus memiliki peluang untuk mengalami kejadian banjir lebih tinggi daripada tekstur tanah yang lebih kasar

2. Faktor Non alam

¹⁰ Buku Saku Tanggap Tangguh Menghadapi Bencana, (BNPB:Jakarta,2012) h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bencana non-alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kecelakaan transportasi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan juga kegiatan keantariksaan.

Contoh Perubahan guna lahan banjir disebabkan oleh beberapa faktor, tapi umumnya disebabkan oleh adanya perubahan guna lahan di daerah tangkapan air yakni daerah hulu/upland. Pertambahan jumlah penduduk akibat urbanisasi, tidak teraturnya tata ruang perkotaan dan pemanfaatan guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah mengakibatkan meningkatnya permasalahan banjir di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kawasan kedap air di area perkotaan sehingga menyebabkan peningkatan run off.

3. Faktor Sosial

Terakhir, bencana yang disebabkan faktor sosial yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Bencana sosial meliputi konflik dan kerusuhan sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, sabotase, dan bahkan teror yang sering terjadi.¹¹

Contoh Kapasitas drainase yang tidak memadai pengurangan kapasitas tampung drainase disebabkan oleh adanya sedimentasi dan faktor lain yang disebabkan oleh manusia, seperti tersumbatnya saluran akibat sampah yang dibuang secara sengaja ke dalam sistem drainase. Hal tersebut menyebabkan volume air yang dapat tertampung berada di bawah volume rencana kapasitas

¹¹ <https://tirto.id/faktor-penyebab-terjadinya-bencana-alam-ada-faktor-sosial>, diakses pada tanggal 20 oktober 2025, pukul 21.00

drainase yang seharusnya. Di samping itu, penurunan kapasitas drainase dapat disebabkan oleh adanya bangunan yang berada di sempadan sungai sehingga menghambat aliran dan menyulitkan operasi pemeliharaan sungai

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

1. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.¹² bencana terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana. untuk itu berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didasarkan pada regulasi daerah. pemerintah pusat menyerahkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPBD, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di indonesia telah mendirikan BPBD.

¹² Sugipto Beong, et.al., "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda" dalam Journal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman, Volume 6., No. 4., (2018), h. 776-779.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Sedangkan fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.¹³ selain itu tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

¹³ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Pasal 21:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.¹⁴

3. Prinsip penanggulangan Bencana

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:¹⁵

- a. Cepat dan tepat, bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan

¹⁴ <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202007-1.pdf> diakses pada tanggal 11 oktober 2023.

¹⁵ Massi Randy Atma R. "Urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hakam 13.1 (2019): 73-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prioritas, bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi dan ketepaduan, bahwa dalam penanggulangan bencana. Didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya guna dan berhasil guna, adalah bahwa dalam mengatasi bencana atau kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu tenaga dan biaya yang berlebihan

e. Transpuransi dan akuntabilitas, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

4. Tujuan Penanggulangan Bencana

Tujuan penanggulangan bencana dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana bertujuan untuk:¹⁶

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 4 Tentang tujuan Penanggulangan Bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menghargai budaya lokal
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Tahap Penanggulangan Bencana

Tahap penanggulangan bencana meliputi tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.¹⁷ Mengenai reformulasi kebijakan penanggulangan bencana pada masing-masing tahapan atau fase:

1. Reformulasi Kebijakan pada Tahap Prabencana

Dalam UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana antara lain meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang pendidikan dan pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sementara dalam hal situasi situasi terdapat potensi terjadi bencana

¹⁷ Osmar Shalih,” Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia” dalam journal cakrawala, Volume15., No 2., (2021), h. 80-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reformulasi Kebijakan pada Tahap Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

3. Reformulasi Kebijakan pada Tahap Pascabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasca- bencana meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun rehabilitasi meliputi: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi, pelayanan publik.

Sementara rekonstruksi meliputi: pembangunan kembali pra sarana dan sarana, Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Masyarakat,



peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan public dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa tinjauan terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

Skripsi pertama dilakukan oleh Ramisa Hazlin (2018) dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Kampar, Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian tersebut memfokuskan tempat terjadinya bencana banjir di Kabupaten Kampar, Sedangkan peneliti memfokuskan bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hulu, Penelitian tersebut mengenai Analisis Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi BPBD di Kabupaten Kampar, Sedangkan peneliti meneliti Peran BPBD di Kabupaten Indragiri Hulu.¹⁸

Skripsi kedua dilakukan oleh Rio Nanda Putra (2023) dengan judul Penanggulangan Kebakaran Hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup Di Kecamatan Kubu Rokan Hilir dalam tinjauan fiqh siyasah, Adapun perbedaannya peneliti berjudul tinjauan fiqh siyasah

¹⁸ Skripsi Ramisa Hazlin, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar." Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap peran BPBD dalam menangani banjir berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana studi kasus di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu, Penelitian tersebut memfokuskan tempat terjadi bencana di Kecamatan Kubu Rokan Hilir, Sedangkan peneliti memfokuskan di Kabupaten Indragiri Hulu Desa Pekan Heran, penelitian tersebut mengenai tugas BPBD dalam menangani bencana kebakaran, sedangkan peneliti mengenai tugas BPBD dalam menangani bencana banjir.¹⁹

Skripsi ketiga dilakukan oleh Hardjanto Dwi Nugroho (2018) dengan judul Analisis Daerah Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah adapun perpedaaan penelitian tersebut terjadi di Kecamatan Kebumen Kabupaten Jawa Tengah sedangkan peneliti terjadi di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, penelitian tersebut memfokuskan daerah yang rawan bencana banjir sedangkan peneliti teliti bencana banjir hanya di Desa Pekan Heran.²⁰

Skripsi keempat dilakukan oleh Massi Randy Atma R dengan judul urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hukum. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian tersebut memfokuskan pada peraturan daerah sedangkan yang peneliti teliti fokus pada undang-undang, jurnal tersebut membahas mengenai urgensi

¹⁹ Skripsi Rio Nanda Putra, "Penanggulangan Kebakaran Hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup Di Kecamatan Kubu Rokan Hilir dalam tinjauan fiqih siyasah." . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.

²⁰ Skripsi Hardjanto Dwi Nugroho, "Analisis Daerah Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah adapun perpedaaan penelitian tersebut terjadi di Kecamatan Kebumen Kabupaten Jawa Tengah." . Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah dalam penyelenggaraan bencana. Sedangkan yang peneliti teliti peran BPBD dalam menanggulangi Bencana Banjir dan peneliti teliti terfokus pada bidang ilmu Hukum Tata Negara.²¹

Jurnal ini dilakukan oleh Novan Suryadi (2020) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kelurahan Sempaja Selatan sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.²²

Jurnal ini dilakukan oleh Endah Mustika Ramdani (2015) dengan judul Koordinasi Oleh Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini bahwa pencapaian tujuan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum didukung oleh koordinasi yang baik antara intansi terkait dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung. Kendala yang dialami dalam proses penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung adalah karena belum adanya kesamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Intansi terkait koordinasi masih belum dapat beradaptasi dengan peran

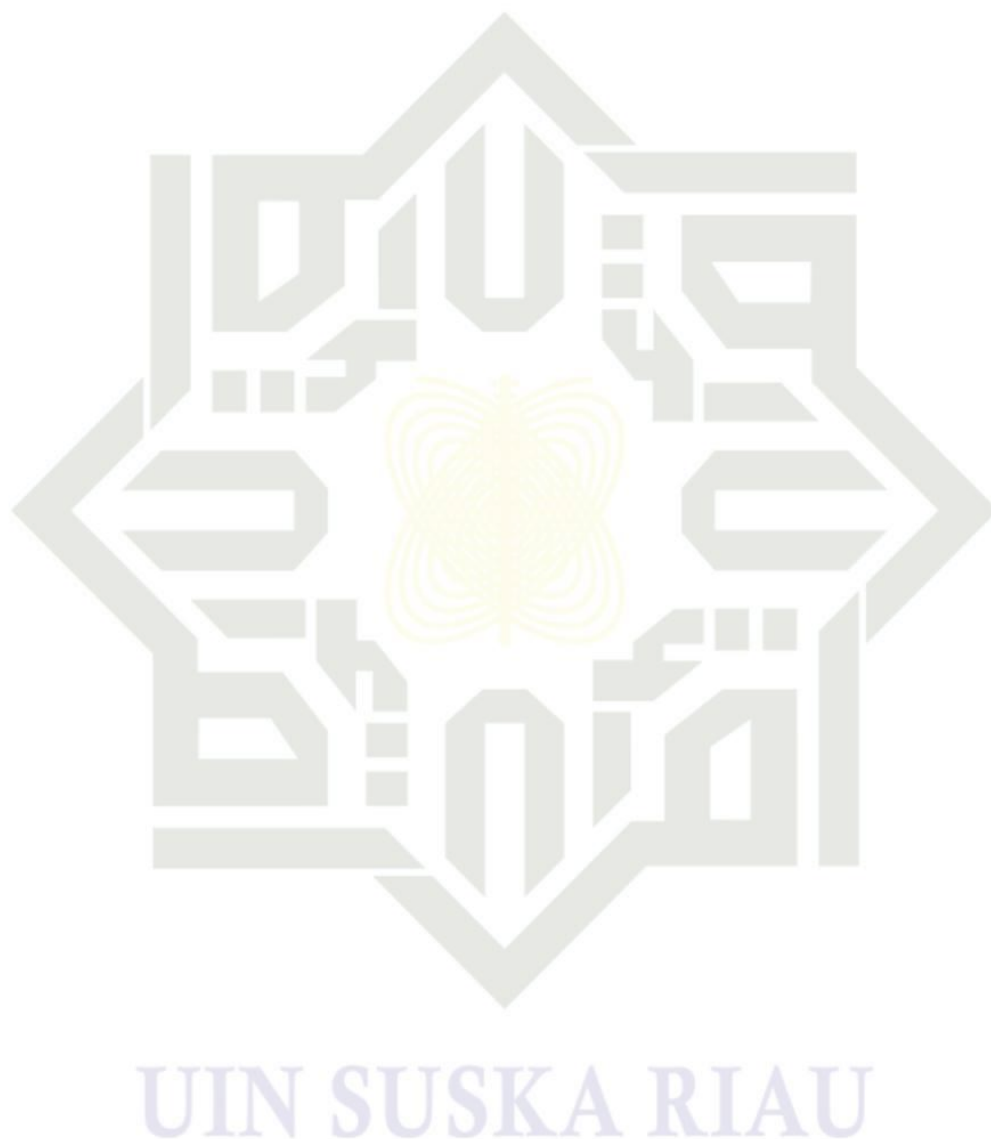
²¹ Skripsi Massi Randy Atma R, *“Urgensi peraturan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bilancic formal stadi rama syariah dan hukum”* Tahun 2019

²² Novan Suryadi Dalam Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda, *jurnal ilmu pemerintahan*. Volume 8 No 2 2020.

BPBD sebagai koordinator dan pada pelaksanaanya intansi terkait masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³ Endah Mustika Ramdani Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. Volume 12 No 3 Desember 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).²⁴ Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dengan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari Responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi Di kantor BPBD Jl. Indragiri No.64 Kelurahan, Pematang Reba, Kecamatan.Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2010), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hulu beserta staf-staf jajarannya dan masyarakat.

Objek Penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hulu dalam menangani bencana banjir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di desa Pekan Heran perspektif fiqh siyasah

D. Informan

Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penanggulangan banjir di Desa Pekan Heran.

- 1) Kepala atau Staf BPBD Kabupaten Indragiri Hulu
→ Memberikan informasi tentang peran, tugas, kebijakan, dan tantangan BPBD dalam menangani banjir di wilayah tersebut.
- 2) Aparat Desa Pekan Heran (Kepala Desa atau Perangkat Desa)
→ Menjelaskan respons pemerintah desa terhadap banjir dan kerja sama dengan BPBD.
- 3) Warga yang terdampak banjir
→ Memberikan perspektif masyarakat mengenai bantuan, evakuasi, serta efektivitas tindakan BPBD

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang selang diteliti.²⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, Penelitian turun langsung ke lapangan.²⁶
2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁷ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁸ Dokumentasi penelitian

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), h.

²⁶ P. Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h. 102.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri 2017), h. 372.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Menurut I Made Winartha,³⁰ metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

²⁹ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

³⁰ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 155.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peran BPBD Indragiri Hulu belum optimal dengan Undang-Undang karena masih banyak ditemukan jawaban dari masyarakat jikalau BPBD ini masih lambat dalam merespon pada saat terjadinya bencana, sedangkan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD masyarakat mengakui bahwa mereka jarang mendapatkan sosialisasi dari BPBD tersebut Adapun kendala dan hambatan yang dialami oleh BPBD dalam menangani bencana yaitu pada saat kondisi darurat serta juga karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pihak BPBD sulit untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menurut perspektif fikih siyasah pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana belum sesuai dengan fikih siyasah. Karena dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yang belum optimal adil dan secara efektif dan efisien serta terpadu dan menyeluruh. Hal ini menyangkut ketidak sesuaian BPBD dalam menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin disebutkan dalam Quran surah An-nisa ayat 58 bahwasanya Allah telah menyuruh pemimpin untuk menyampaikan amanat secara adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi BPBD belum optimal dalam melaksanakan amanah tersebut tinjauan fikih siyasah dalam penelitian ini menggunakan fikih siyasah tanfidziyah yang membahas tentang peraturan daerah dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Di dalam perspektif fikih siyasah tugas pemimpin dalam menangani bencana mengarah pada basis komunitas ke masyarakat hal ini tidak jauh berbeda dan tidak saling berlawanan dengan yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 pada pasal 21 telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash Alquran dan hadist jadi yang belum sesuai dengan fikih siyasah yaitu pelaksanaan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal adil dan setara, efektif dan efisien serta terpadu dan menyeluruh

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya BPBD, Peningkatan Anggaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Peran Serta dan Edukasi Masyarakat.
2. Pemetaan Risiko Bencana Akurat, Lakukan pemetaan risiko bencana banjir secara detail dan berkala, termasuk analisis kerentanan dan kapasitas masyarakat, untuk menjadi dasar penyusunan rencana kontingensi dan zonasi wilayah rawan bencana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buku Saku *Tanggap Tangguh Menghadapi Bencana*, BNPB: Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Horopoetri dkk, *peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, Jakarta: Walhi, 2003.
- Himpunan Putusan Tarjih 3, *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Amiruddin dan Zainaal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada, 2003.
- P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri 2017.
- Arikunto, Suharismi, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarata: Rinake Cipta 2006.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Wiratha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

- Rosyidie, Arief. "Banjir Fakta Dan Dampaknya Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Volume 24. No. 3 (Desember 2013): h. 241 – 249.
- Beong, Sugipto. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda." *Journal Ilmu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan FISIP Universitas Mulawaran Volume 6. No. 4 (2018): h. 776-779.

Atma, Massi Randy R. "Urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan." *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 13. No 1 (November 2019): h. 73-96

Shalih, Osmar. "Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia." *dalam journal cakrawala* Volume 15. No 2 (2021): h. 80-92.

Suryadi, Novan. "Dalam Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda." *jurnal ilmu pemerintahan* Volume 8. No 2 (2020): h. 425-436.

Ramdani, Endah Mustika. "Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung." Volume 12. No 3 (Desember 2015): h. 383-406.

Skripsi

Skripsi Dila Ratna "Kinerja BPBD Dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqh Siyasah", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Skripsi Ramisa Hazlin, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Skripsi Rio Nanda Putra, "Penanggulangan Kebakaran Hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup Di Kecamatan Kubu Rokan Hilir dalam tinjauan fiqh siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Skripsi Hardjanto Dwi Nugroho, "Analisis Daerah Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah adapun perpedaaan penelitian tersebut terjadi di Kecamatan Kebumen Kabupaten Jawa Tengah", Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Skripsi Massi Randy Atma R, "Urgensi peraturan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bilancic formal stadi rama syariah dan hukum", 2019.

Peraturan perundang-undangan

Negara Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang tentang Penanggulangan Bencana), Pasal (13). Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Website

<https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-letak-astronomis-indonesia-dan-pengaruhnya>, diakses pada tanggal 12 oktober 2024.

<https://www.bnpb.go.id/home/definisi>, diakses pada tanggal 12 oktober 2024, pukul 20.20.

https://www.google.com/search?q=dasar+hukum+dan+kebijakan+bpbd+fiqih+siy+asah&sca_esv= diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

<https://tirto.id/faktor-penyebab-terjadinya-bencana-alam-ada-faktor-sosial>, diakses pada tanggal 20 oktober 2025.

<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202007-1.pdf> diakses pada tanggal 11 oktober 2023.

https://bpbd.lumajangkab.go.id/?page_id=1178 diakses pada tanggal 19 mei 2025.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60474> diakses pada tanggal 19 mei 2025

https://bpbd.purbalinggakab.go.id/?page_id=73 diakses pada tanggal 19 mei 2025

<https://bpbd.batangkab.go.id/?p=2> diakses pada tanggal 19 mei 2025

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Amrianto, Kepala Saksi Kedaruratan, Rehabilitas, dan Rekonstruksi, 8 Mei 2025

Wawancara dengan Bapak Adi Candra, Danton Satgas Penanggulangan Bencana, 8 Mei 2025

Wawancara dengan Bapak Rizki Yunzira, staf bagian program dan perencanaan bencana, 15 mei 2025

Wawancara dengan Masyarakat Ibuk Siti Sholihah, 18 Mei 2025

Wawancara dengan Ibuk Desvita, Kasi pengolahan Data dan Informasi, 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibuk Rina Agus Triyeni, Petugas Pelayanan Informasi Data dan Penerima permohonan, 8 Mei 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja langkah yang dilakukan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengantisipasi banjir di Desa Pekan Heran?
2. Apakah BPBD memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan bencana?
3. Apakah ada sistem peringatan dini (early warning system) yang diterapkan? Bagaimana cara kerjanya?
4. Bagaimana koordinasi antara BPBD dengan pemerintah desa dalam tahap kesiapsiagaan?
5. Bagaimana BPBD merespons saat banjir terjadi di Desa Pekan Heran?
6. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat saat terjadi banjir?
7. Bagaimana proses evakuasi korban banjir dilaksanakan?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi saat penanganan darurat? Jika ya, apa saja?
9. sejauh mana peran BPBD efektif dalam menangani banjir di desa ini?
10. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penanganan banjir?
11. Apakah ada hal yang perlu ditingkatkan dalam penanganan banjir ke depannya?

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitas, Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dan Danton Satgas Penanggulangan Bencana



Wawancara bersama Kasi Pengolahan Data dan Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang



Wawancara bersama Petugas Pelayanan Informasi Data dan Penerima Permohonan



Wawancara bersama Masyarakat Desa Pekan Heran